

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Dapat disimpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti bahwa kondisi akses fisik dan ekonomi memiliki nilai optimal terhadap ketahanan pangan pada beberapa klaster seperti Klaster Dumai; Klaster Kepulauan Meranti; Klaster Kuantan Singingi; Klaster Pelalawan; Klaster Siak; dan Klaster Indragiri Hilir. Hal ini mengartikan jika kondisi akses fisik dan ekonomi mampu mendorong ketahanan pangan daerah. Kondisi akses fisik dan ekonomi dibagi menjadi lima indikator yaitu luas panen padi, jumlah pasar, penduduk miskin, pendapatan, dan konsumsi kalori. Kondisi akses fisik dan ekonomi yang optimal ini didukung oleh program pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan akses fisik dan ekonomi. Program yang diterapkan pemerintah dalam mendorong terciptanya akses fisik dan ekonomi yang memadai seperti:

1. Luas panen padi, Program panen raya padi sukses mengantisipasi kelangkaan dan kekurangan stok beras pada tahun 2020 yang menjadi awal mula Covid-19. Program pembinaan kepada masyarakat petani, untuk meningkatkan hasil pertanian terutama padi serta memberikan sejumlah alat mesin pertanian untuk menunjang pengelolaan sawah. Sinergitas Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten yang baik membuat hasil panen padi terus meningkat dan mencukupi kebutuhan masyarakat Provinsi Riau.
2. Jumlah pasar, Program pembinaan pasar yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian membuat sejumlah pasar berstandar Nasional Indonesia (SNI) yakni meningkatkan keamanan, kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan. Program revitalisasi kawasan pasar juga menjadi salah satu program unggulan untuk meningkatkan peran pasar sebagai penyedia pangan serta akses yang menjadi lebih mudah.
3. Penduduk miskin, Rata-rata jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Riau mengalami tren penurunan, program-program yang

memberikan dampak hal tersebut seperti Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) yaitu dengan meningkatkan pendapatan, pengurangan beban, dan pengurangan kantong kemiskinan serta mensinkronkan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Program Bazmart juga efektif dilaksanakan karena tepat sasaran yang mana diterima oleh masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi. Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) merupakan inovasi untuk membantu percepatan penurunan kemiskinan agar program-program kemiskinan dapat tepat sasaran.

4. Pendapatan, Pendapatan bersih pekerja rata-rata mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, ini merupakan dampak dari beberapa program yang diberikan baik dari pemerintah, swasta, dan stakeholders. Program pelatihan *practical office advanced* dan *digital marketing* untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di semua bidang profesi. Program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan dan keterampilan ilmiah dan religius yang tinggi. Program pelatihan kerja berbasis kemampuan *hard skill* dan *soft skill* untuk meningkatkan keterampilan pekerja.
5. Konsumsi kalori, Konsumsi kalori di wilayah optimal telah memenuhi standar kecukupan gizi bangsa Indonesia, hal ini dikarenakan program-program dari pemerintah setempat telah sukses dilaksanakan seperti program mengatasi gizi buruk yaitu dengan revitalisasi posyandu, peningkatan kapasitas kader posyandu, peningkatan upaya partisipasi masyarakat dengan berbagai sosialisasi terkait kesehatan. Pemberian makanan yang bergizi seperti vitamin/suplemen bagi ibu hamil dan menyusui. Program gerakan langsung atasi stunting dengan sejuta telur (Gelang Anting Sejulur) oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dengan ketahanan pangan yang dilihat dari kondisi akses fisik dan ekonomi yang tidak optimal dengan melihat dari beberapa klaster seperti Klaster Indragiri Hulu; Klaster Kampar; Klaster Rokan Hulu; dan Klaster Rokan Hilir. Hal

ini mengartikan jika kondisi akses fisik dan ekonomi belum mampu mendorong ketahanan pangan daerah. Kondisi akses fisik dan ekonomi yang tidak optimal ini mengartikan bahwa program pemerintah daerah belum mampu mengatasi permasalahan yang ada seperti:

1. Luas panen padi, beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau mengalami penurunan luas panen padi hal ini dikarenakan dampak alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian akibat meningkatnya jumlah penduduk. Alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan penurunan produksi padi sehingga mengganggu tercapainya swasembada pangan.
2. Jumlah pasar, beberapa ruas jalan untuk mengakses ke sumber pangan (pasar) rusak akibat truk-truk pengangkut batu bara yang *over capacity* melewati jalanan pada siang hari dimana mobilitas warga masih tinggi, dampak lingkungan juga dirasakan oleh warga seperti kualitas udara yang buruk akibat batu bara tersebut.
3. Penduduk miskin, permasalahan PHK sepihak yang dilakukan sejumlah perusahaan membuat masyarakat menjadi tidak memiliki penghasilan tetap. Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan belum berjalan dengan optimal karena sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah tidak menggunakan fasilitas khusus, lebih cenderung memberikan fasilitas yang sudah ada.
4. Pendapatan, program pemberdayaan masyarakat petani masih belum optimal karena penyelenggara program tidak melakukan survey secara menyeluruh, akibatnya program ini tidak tepat sasaran. Program pelatihan bagi karyawan belum berjalan optimal karena terdapat permasalahan seperti instruktur pelatihan yang belum mampu mengajak peserta aktif dan tidak memiliki daya tarik sebagai instruktur, hal ini disebabkan karena instruktur berasal dari pihak internal perusahaan. Masih kurangnya program pendidikan dan pelatihan keterampilan, rendahnya keinginan masyarakat untuk menjadi pengusaha, dan masih kurangnya pemanfaatan tenaga kerja lokal oleh pihak industrial.

5. Konsumsi kalori, terdapat beberapa wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Riau masih belum mencapai standar kecukupan gizi nasional bagi bangsa Indonesia, hal ini dikarenakan beberapa program pemerintah belum berhasil mendongkrak konsumsi pangan yang bergizi dan berenergi cukup seperti masih rendahnya pengetahuan kepala rumah tangga terhadap pangan yang bernutrisi. Pelaksanaan program penanganan stunting belum memenuhi sasaran, sosialisasi yang masih kurang dan sarana prasarana masih belum memadai sehingga menjadi penghambat dalam penanganan stunting.

Bagi pemerintah daerah diharapkan untuk terus melakukan evaluasi terkait program yang telah dilaksanakan demi mempertahankan serta meningkatkan akses fisik dan ekonomi yang dapat berpengaruh positif bagi ketahanan pangan.

V.2 Saran

1. Aspek Teoritis
 - a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel yang berbeda agar dapat menjelaskan pengaruh variabel lain yang mempengaruhi ketahanan pangan.
 - b. Penggunaan teknik analisis keberlanjutan dengan metode QCA dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya agar menemukan suatu variabel yang memiliki nilai optimal untuk mempengaruhi *outcome*.

2. Aspek Praktis

Dalam penelitian ini kondisi akses fisik dan ekonomi memiliki nilai optimal terhadap *outcome* yaitu ketahanan pangan. Dalam kondisi akses fisik dan ekonomi menggambarkan bahwa wilayah yang optimal berada pada Klaster Dumai; Klaster Kepulauan Meranti; Klaster Kuantan Singingi; Klaster Pelalawan; Klaster Siak; dan Klaster Indragiri Hilir. Hal ini menandakan bahwa program yang berkaitan dengan akses fisik dan ekonomi yang diterapkan pemerintah daerah di klaster tersebut sudah efektif dalam menciptakan akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang aman dan bernutrisi, hendaknya ini dapat dijadikan contoh untuk wilayah lain dalam mengatasi permasalahan akses fisik dan ekonomi di daerahnya.

Kedepannya pemerintah daerah dapat memberikan evaluasi terhadap target maupun kebijakan yang akan dicapai dengan seluruh komponen dalam pemerintahan agar tercipta kondisi akses fisik dan ekonomi yang memadai sehingga mendorong ketahanan pangan daerah.